

ABSTRAK

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) PADA PERUSAHAAN INDEKS IDX ESG LEADERS PERIODE 2021-2024

Oleh :

Intan Mutiara¹

Nensi Yuniarti Zs²

Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menjadi salah satu bentuk transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi mengenai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola kepada pemangku kepentingan. *Corporate Governance* yang baik diharapkan dapat mendorong perusahaan meningkatkan kualitas pengungkapan ESG. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, diversitas gender, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan rapat dewan direksi terhadap pengungkapan ESG pada perusahaan Indeks IDX ESG Leaders tahun 2021–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 14 perusahaan dengan periode pengamatan empat tahun, sehingga diperoleh 56 observasi. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan EViews 12.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan ukuran komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan ESG. Sementara itu, ukuran dewan direksi dan diversitas gender berpengaruh negatif namun tidak signifikan, sedangkan proporsi komisaris independen dan rapat dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan ESG. Dengan demikian, kepemilikan institusional dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ESG, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan.

Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, *Diversitas Gender*, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, Rapat Dewan Direksi dan Pengungkapan ESG.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE ON ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) DISCLOSURE IN IDX ESG LEADERS INDEX COMPANIES FROM 2021 TO 2024

By :

Intan Mutiara¹

Nensi Yuniarti Zs²

ESG disclosure is one form of corporate transparency in communicating information regarding environmental, social, and governance aspects to stakeholders. Good Corporate Governance is expected to encourage companies to improve the quality of ESG disclosure. This study aims to examine the effect of Corporate Governance, as measured by institutional ownership, board size, gender diversity, the proportion of independent commissioners, audit committee size, and board meeting frequency, on ESG disclosure among companies included in the IDX ESG Leaders Index for the period 2021 to 2024. This study uses a quantitative approach with secondary data obtained from companies' annual reports and sustainability reports. A total of 14 companies were selected using purposive sampling over a four-year observation period, resulting in 56 observations. The data were analyzed using panel data regression analysis with EViews 12.

The results indicate that institutional ownership has a significant and positive effect on ESG disclosure, while audit committee size has a significant and negative effect on ESG disclosure. Meanwhile, board size and gender diversity have negative but insignificant effects on ESG disclosure. The proportion of independent commissioners and board meeting frequency have positive but insignificant effects on ESG disclosure. Therefore, institutional ownership and audit committee size have a significant effect on ESG disclosure, while the other variables do not have significant effects.

Keywords: Institutional Ownership, Board Size, Gender Diversity, Proportion of independent commissioners, Audit Committee Size, board meeting frequency and ESG Disclosure.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iii
SERTIFIKASI.....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	19
1.3 Batasan Masalah.....	20
1.4 Rumusan Masalah	21
1.5 Tujuan Penelitian.....	22
1.6 Manfaat Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
2.1 Deskripsi Konseptual	24
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	24
2.1.2 <i>Environmental, Social, and Governance</i> (ESG)	26
2.1.3 Kepemilikan Institusional	29

2.1.4	Ukuran Dewan Direksi.....	30
2.1.5	<i>Diversitas gender</i>	31
2.1.6	Proporsi Komisaris Independen	33
2.1.7	Ukuran Komite Audit.....	35
2.1.8	Jumlah Rapat Dewan Direksi.....	36
2.1.9	Variabel Kontrol.....	38
2.2	Hasil Penelitian Yang Relevan.....	42
2.3	Kerangka Konseptual	44
2.2	Definisi Operasional.....	46
2.3	Hipotesis.....	48
2.3.1	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i>	48
2.3.2	Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i>	49
2.3.3	Pengaruh <i>Diversitas gender</i> Terhadap Pengungkapan <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i>	51
2.3.4	Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i>	52
2.3.5	Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i>	53
2.3.6	Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i>	54
BAB III METODE PENELITIAN		56
5.1	Tempat dan Waktu Penelitian	56
3.2	Metode Penelitian.....	56
3.3	Populasi dan Sampel	56

3.3.1	Populasi Penelitian	56
3.3.2	Sampel Penelitian	57
3.4	Teknik Pengumpulan Data	58
3.4.1	Studi Dokumentasi	58
3.4.2	Studi Kepustakaan	58
3.5	Teknik Analisis Data	58
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	59
3.5.2	Analisis Regresi Data Panel	59
3.5.3	Pemilihan Model Regresi Data Panel	60
3.5.4	Uji Asumsi Klasik	64
3.5.5	Uji Hipotesis	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		68
4.1	Hasil Penelitian	68
4.1.1	Gambaran Umum	68
4.1.2	Analisis Statistik Deskriptif	69
4.1.3	Hasil Uji Pemilihan Estimasi	75
4.1.4	Hasil Uji Asumsi Klasik	77
4.1.5	Analisis Regresi Data Panel	81
4.1.6	Hasil Uji Hipotesis	83
4.2	Pembahasan	88
4.2.1	Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan ESG	88
4.2.2	Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan ESG	89
4.2.3	<i>Diversitas gender</i> terhadap Pengungkapan ESG	90
4.2.4	Proporsi Komisaris Independen terhadap Pengungkapan ESG	91
4.2.5	Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan ESG	93

4.2.6	Jumlah Rapat Dewan Direksi terhadap Pengungkapan ESG	94
4.2.7	Analisis Hasil Variabel Kontrol	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		98
5.1	Kesimpulan.....	98
5.2	Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....		101
LAMPIRAN.....		118



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Yang Relevan	42
Tabel 2. 2 Definisi Operasional	46
Tabel 4. 1 Rincian Perolehan Sampel.....	68
Tabel 4. 2 Daftar Sampel Penelitian	69
Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	70
Tabel 4. 4 Hasil Uji <i>Chow</i>	76
Tabel 4. 5 Hasil Uji <i>Hausman</i>	77
Tabel 4. 6 Hasil Uji Mutikolinearitas	79
Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	80
Tabel 4. 8 Hasil Uji Regresi Data Panel	81
Tabel 4. 9 Hasil Uji F	83
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	84
Tabel 4. 11 Hasil Uji <i>t</i>	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan ESG Leader	3
Gambar 1. 2 Perkembangan ESG Leader	3
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	45
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam era globalisasi yang semakin kompetitif dan terbuka, keberlanjutan suatu perusahaan kini tidak hanya diukur berdasarkan hasil keuangan, tetapi juga berdasarkan komitmennya terhadap faktor-faktor *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (Zaini et al., 2025). Implementasi keberlanjutan, yang mencakup unsur-unsur *Environmental, Social, and Governance* (ESG), telah menjadi perhatian utama akibat tekanan dari pemangku kepentingan dan masyarakat yang menginginkan praktik bisnis yang lebih etis dan ramah lingkungan (Farhan, 2024). Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah menjadi landasan penting dalam kegiatan bisnis saat ini, karena dapat mengevaluasi dan menyampaikan dampak keberlanjutan perusahaan secara lebih komprehensif (Gustanto & Risman, 2025).

Environmental, Social, and Governance (ESG) adalah standar atau pedoman yang digunakan perusahaan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Menurut (*International Finance Corporation*, 2021), sebuah lembaga keuangan di bawah Bank Dunia, *Environmental, Social, and Governance* (ESG) mencakup berbagai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dipertimbangkan oleh perusahaan dalam kegiatan bisnis mereka dan oleh investor dalam memilih investasi yang berkaitan dengan risiko, dampak, dan peluang. Ketiga aspek ini berfungsi sebagai kerangka acuan untuk pengambilan keputusan investasi dan panduan bagi perusahaan dalam

melaporkan dampak operasional yang terkait dengan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (Chirsty & Sofie, 2023). ESG bukan hanya sekadar tren, tetapi juga suatu keharusan di dunia bisnis saat ini. Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu-isu lingkungan dan sosial, investor dan konsumen semakin memilih untuk berinvestasi pada perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. Hal ini mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip ESG sebagai dasar dalam mengambil keputusan bisnis jangka panjang (Prudential, 2024). Makin banyak perusahaan yang memublikasikan kinerja ESG kepada publik merupakan strategi untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan (Amalia & Kusuma, 2024).

Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan sejumlah indeks yang berbasis pada kriteria *Environmental, Social, and Governance* (ESG), guna membantu investor dalam mengidentifikasi emiten yang memperhatikan keberlanjutan dalam kegiatan perusahaannya (Malik, 2024). Investor dalam negeri bisa dengan mudah mengenali perusahaan lokal yang telah berorientasi ESG dengan membaca daftar emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), salah satunya yaitu *ESG Leaders* (IDXESGL) (Kurnia, 2024). *IDX ESG Leaders* adalah indeks yang terdiri dari 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki peringkat ESG tertinggi, tidak terlibat dalam isu-isu kontroversial yang signifikan, dan menunjukkan likuiditas transaksi yang baik serta kinerja keuangan yang baik (SIG, 2025).

Gambar 1. 1
Perkembangan ESG Leaders



Gambar 1. 2
Perkembangan ESG Leaders

	2021	2022	2023	2024	YTD Mei 2025
IDX LQ45 Low Carbon Leaders	6,70%	1,90%	6,50%	-13,30%	-0,9%
ESQ Quality-45 IDX Kehati	0,70%	11,65	5,40%	-12,70%	0,8%
ESG Sector Leaders IDX Kehati	-1,70%	12,70%	4,30%	-12,10%	0,8%
SRI-KEHATI	-1,10%	14,00%	4,80%	-14,00%	1,3%
IDX ESG Leader	-4,10%	3,10%	11,00%	-5,60%	2,3%
JCI	16,90%	10,10%	6,20%	-2,70%	1,4%
LQ45	18,60%	-0,40%	3,60%	-14,80%	-1,4%

Sumber : : IDX – Factsheet Mei 2025

Dari gambar di atas Indeks IDX ESG Leader menunjukkan performa yang baik dan bahkan mampu bersaing dengan JCI dan LQ45 dalam periode tertentu. Pada tahun 2023, Indeks ini menunjukkan hasil lebih tinggi yakni 11,00%, mengungguli JCI yang berada di angka 6,20% dan LQ45 di 3,60%. Walaupun mengalami beberapa perubahan, khususnya di tahun 2024 dengan hasil -5,60%, dan kembali positif sebesar 2,3% hingga Mei 2025, kinerja IDX ESG Leader tetap dianggap kompetitif jika dibandingkan dengan JCI dan LQ45 pada periode tersebut. Hasil ini memberikan sinyal yang menggembirakan bagi kemajuan investasi berkelanjutan dan pasar modal di Indonesia, didorong oleh meningkatnya kesadaran dari

investor muda yang semakin selektif dalam memilih investasi yang memperhatikan tanggung jawab terhadap *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Berbagai kasus pelanggaran yang melibatkan perusahaan besar di Indonesia mengindikasikan rendahnya pemahaman dan perhatian korporasi terhadap isu-isu *Environmental, Social Governance* (ESG). Berkaitan dengan aspek *Environmental* tahun 2023 PT Unilever di Kawasan Ekonomi Khusus, Kecamatan Bosar Maligas membiarkan genangan air yang diduga bercampur zat kimia beracun limbah tercecer sembarangan (Japos.co, 2023). Di sisi *Social*, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Bank Mandiri karena diduga terlibat dalam konflik agraria, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan praktik-praktik ilegal di wilayah operasinya. Serta terdapat juga di sisi *Governance* yaitu keputusan pemberian kredit oleh bank mandiri kepada pihak yang memiliki ketidakpastian hukum dan terlibat dalam konflik lapangan dinilai melanggar prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) serta prinsip Mengenal Nasabah (KYC). Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam kerangka *due diligence* dan manajemen risiko kredit terkait aspek legal dan keberlanjutan (InfoSawit, 2024). Kasus-kasus ini secara kolektif membuktikan bahwa komitmen terhadap ESG belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik bisnis di Indonesia.

Terdapat hasil penelitian mengenai *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dari Rinaldy & Inawati, (2025) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh dan berdampak positif terhadap *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Artinya, peningkatan jumlah anggota dewan menandakan penguatan tanggung jawab dan peran mereka dalam melaksanakan tugas meliputi

pengawasan, memberikan arahan strategis, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan penelitian Septiana & Puspawati, (2022); Ramadan et al.,(2025;) menunjukkan bahwa keberadaan dewan direksi tidak memengaruhi ESG. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah anggota dewan direksi tidak berkontribusi pada peningkatan skor ESG. Konflik kepentingan di antara berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan mungkin menghalangi dewan direksi untuk sepenuhnya mendukung kebijakan ESG yang lebih kuat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan ESG, yaitu *Corporate Governance*. *Corporate Governance* diproksikan dengan mekanisme kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, *diversitas gender*, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit dan jumlah rapat dewan direksi.

Kepemilikan Institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan oleh berbagai organisasi atau lembaga (seperti bank, dana pensiun, reksa dana, perusahaan asuransi, dan pemerintah) yang tidak dimiliki oleh individu (Latifah et al., 2024). Menurut Mediaty et al., (2024) Kepemilikan institusional adalah istilah yang menjelaskan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh organisasi-organisasi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, bank investasi, lembaga keuangan, dan manajer investasi profesional, yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menangani investasi dalam skala besar. Dengan besarnya investasi yang mereka tanamkan, lembaga-lembaga ini sering menjadi pemegang saham utama di perusahaan-perusahaan. Posisi ini memberikan mereka kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengawasi tindakan manajemen (Zaid et al., 2020).

Tujuan dari kepemilikan ini adalah untuk mengawasi manajemen secara profesional dan efisien, meningkatkan kinerja, dan menghindari praktik manajemen yang oportunis atau manipulatif. Hal ini karena lembaga-lembaga tersebut memiliki sumber daya dan kekuasaan untuk melakukan pengawasan yang ketat demi kepentingan pemegang saham. Kepemilikan Institusional yang signifikan dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan mereka terkait isu-isu *Environmental, Social, and Governance* (ESG) guna memenuhi harapan pemegang saham yang berfokus pada keberlanjutan (Tambunan & Wahyuliza, 2024). Selain itu, Kepemilikan Institusional sering dianggap memiliki kemampuan pengawasan yang lebih baik untuk menuntut agar manajemen meningkatkan transparansi dan kinerja perusahaan.

Terdapat adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan *Governance* pada keputusan investasi strategis yang dilakukan oleh Institusi Kepemilikan. Hal ini terlihat dari kasus dugaan korupsi terkait investasi yang dilakukan oleh PT Telkomsel perusahaan anak dari BUMN di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Tempo, 2022). Penyelidikan dari Kejaksaan Agung menunjukkan adanya indikasi bahwa investasi tersebut dilakukan tanpa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan melibatkan konflik kepentingan dari pejabat BUMN. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas Institusi Kepemilikan dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta memastikan bahwa aspek *Governance* (G) dari pilar ESG diikuti. Ketika institusi publik dicurigai mengabaikan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam mengambil keputusan investasi, hal ini menunjukkan adanya risiko signifikan

bahwa kontrol internal dan komitmen kepada nilai-nilai ESG telah terkikis oleh kepentingan yang bersifat jangka pendek atau pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Tambunan & Wahyuliza, (2024) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. Kepemilikan institusional memperkuat tuntutan akan pengungkapan informasi guna mencapai keberlanjutan. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut memandang transparansi informasi sebagai hal yang krusial bagi para pemangku kepentingan untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik dan efektif. Sedangkan penelitian Rivandi (2021), menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional di Indonesia tidak dianggap sebagai faktor utama dalam keputusan investasi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Akibatnya, investor institusional tidak secara aktif mendorong perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dan sosial mereka dalam laporan tahunan. Selain faktor kepemilikan institusional, aspek ukuran dewan direksi juga perlu diperhatikan karena dapat berperan dalam meningkatkan pengungkapan ESG.

Ukuran dewan direksi adalah jumlah total anggota dewan direksi perusahaan, yang berperan penting dalam meningkatkan pengawasan strategis perusahaan (Ding et al., 2024). Menurut Larcker & Tayan, (2020) mendefinisikan dewan direksi sebagai sekumpulan orang yang ditunjuk oleh para pemilik saham untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengelolaan atas nama mereka. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memberikan persetujuan terhadap strategi perusahaan, mengawasi kinerja manajemen, serta memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan

peraturan yang ada. Dewan direksi yang lebih besar sering dianggap mampu membawa beragam keahlian dan perspektif, sehingga meningkatkan responsivitas perusahaan terhadap tuntutan keberlanjutan dari pemangku kepentingan (Regina & Agustina, 2025). Dewan yang lebih besar dikaitkan dengan efektivitas pengawasan yang lebih tinggi dan transparansi, yang membantu mengatasi ketidakseimbangan informasi dan memastikan bahwa keputusan diambil sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan (Sifananda et al., 2024). Oleh karena itu, dewan yang memiliki ukuran yang memadai diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan ESG secara transparan dan berkualitas.

Kasus korupsi yang melibatkan proyek *Electronic Data Capture* (EDC) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dari tahun 2018 - 2023 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,1 triliun (InfoPublik, 2025). Kasus ini juga telah membawa mantan Wakil Direktur Utama dan Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi BRI menjadi tersangka, dan menyoroti masalah serius dalam praktik Tata Kelola Perusahaan di tingkat yang paling atas. Partisipasi pejabat tingkat direktur dalam praktik pengadaan yang tidak transparan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penerimaan gratifikasi mengindikasikan adanya kelemahan yang signifikan dalam akuntabilitas dan sistem pengendalian internal di dewan direksi. Masalah ini berhubungan dengan ukuran dewan direksi, karena ketidakberhasilan dalam tata kelola ini kemungkinan dipengaruhi oleh efektivitas dalam pengawasan dan pengambilan keputusan yang ada dalam susunan dewan.

Penelitian dari Rinaldy & Inawati, (2025) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan

Environmental, Social, and Governance (ESG) di semua sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2023. Dewan direksi yang lebih besar menunjukkan peningkatan peran dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan tugasnya, termasuk pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, memberikan arahan strategis, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sedangkan penelitian dari Asmaul Husna Gempita et al, (2023) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG, artinya hasil studi ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi, baik sedikit maupun banyak, tidak akan berdampak pada pengungkapan *Environmental, Social, and Governance (ESG)* suatu perusahaan.

Menurut Larcker & Tayan, (2020) *Diversitas gender* adalah persentase atau jumlah wanita yang ada di dalam jajaran manajemen dan dewan pengawas perusahaan. Keberagaman gender merujuk pada perbandingan antara jumlah wanita dan pria. Pria dan wanita cenderung menunjukkan pola perilaku yang berbeda. Diketahui bahwa wanita lebih cenderung menggunakan intuisi saat membuat keputusan, lebih mampu melakukan beberapa tugas sekaligus, dan lebih mahir dalam membangun relasi. Di sisi lain, pria biasanya fokus pada tugas tertentu dan membuat keputusan berdasarkan data serta prosedur (R. Setiawan et al., 2025). Adanya keberagaman ini dianggap sebagai suatu pendekatan dalam pengelolaan perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja pengawasan, kualitas keputusan yang diambil, serta akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan. (Anindyastri & Risfandy, 2025). Nilai-nilai yang berbeda dari kedua *gender* tersebut dapat saling berinteraksi dan melengkapi satu sama lain,

dengan harapan dapat mengurangi dampak tekanan eksternal sehingga praktik berkelanjutan yang efisien dapat diwujudkan (Hidayah, Mulyanto, et al., 2023).

Fenomena rendahnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan masih menjadi tantangan yang signifikan di sektor infrastruktur dan telekomunikasi di Indonesia. Salah satu contohnya dapat dilihat pada PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), di mana selama periode 2021–2024 seluruh anggota Dewan Direksi didominasi oleh laki-laki tanpa adanya keterwakilan perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberagaman gender pada tingkat manajemen puncak perusahaan masih relatif rendah. Fenomena serupa juga terjadi pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM). Berdasarkan laporan tahunan perusahaan periode 2021–2024, komposisi Dewan Direksi masih didominasi oleh laki-laki, dengan hanya satu perempuan yang menduduki posisi direksi dari total sembilan anggota dewan. Rendahnya proporsi perempuan dalam jajaran direksi tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan masih terbatas.

Penelitian dari Natafa & Mutmainah, (2025) mengungkapkan bahwa *Diversity gender* dalam kepemimpinan dewan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan komposit ESG, terutama pada aspek lingkungan dan sosial. Keberagaman gender cenderung mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai upaya untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Sedangkan penelitian Kevin Nicholas Sirait, (2024) *diversitas gender* dalam direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ESG. *Diversity gender* diukur berdasarkan proporsi perempuan dalam jajaran dewan direksi.

Proporsi direksi perempuan yang masih rendah mengakibatkan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan perusahaan belum signifikan.

Proporsi Komisaris Independen adalah perbandingan yang menunjukkan jumlah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki koneksi atau kepentingan bisnis yang signifikan dengan perusahaan, manajemen, atau pemegang saham pengendali (Deniza et al., 2023). Proporsi ini menjadi indikator dalam praktik *Corporate governance*. Berdasarkan peraturan di Indonesia, proporsi minimal yang diwajibkan adalah 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris, untuk menjamin adanya pengawasan yang obyektif terhadap manajemen, khususnya dalam mewakili kepentingan *stakeholder* non-pemilik serta pemegang saham minoritas (OJK, 2014). Tugas dewan komisaris dalam perusahaan cukup menantang karena mereka harus menghadapi berbagai tanggung jawab. Mereka tidak hanya harus mencegah praktik-praktik buruk dalam manajemen yang berpotensi menyebabkan kegagalan atau skandal, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan (Deniza et al., 2023). Dengan semakin banyak komisaris independen, diharapkan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh manajer menjadi lebih efektif. Pengawasan yang baik dari komisaris terhadap perusahaan akan membantu mengurangi konflik kepentingan dan mendorong direksi untuk melakukan pengungkapan yang lebih transparan, termasuk informasi terkait keberlanjutan ESG (Qurniasih et al., 2025).

Gugatan yang diajukan oleh TuK Indonesia terhadap Bank Mandiri pada tahun 2024 merupakan momen penting yang mengungkap kelemahan dalam kepemimpinan dalam menegakkan kepatuhan terhadap norma-norma keberlanjutan

(TuK, 2024). Bank Mandiri disangka melanggar prinsip kehati-hatian dengan terus memberikan dukungan finansial kepada pihak-pihak yang dicurigai terlibat dalam sengketa tanah, aktivitas ilegal, dan pelanggaran hak asasi manusia, yang berlawanan dengan komitmen mereka akan keberlanjutan. Hal ini sangat terkait dengan jumlah komisaris independen, karena mereka adalah bagian penting dari Dewan Komisaris, yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi Dewan Direksi dan memastikan bahwa keputusan strategis, termasuk yang berhubungan dengan pembiayaan, sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta manajemen risiko yang berkaitan dengan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Ketidakmampuan Bank Mandiri dalam mengendalikan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi ini menunjukkan adanya kekurangan pengawasan dari Komisaris Independen.

Penelitian yang dilakukan oleh Ellili, (2023) menunjukkan bahwa hadirnya komisaris independen dapat meningkatkan pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai upaya untuk memberikan transparansi mengenai kinerja perusahaan yang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh (Fujianti et al., 2024) yang mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen berkontribusi secara signifikan terhadap pengungkapan ESG karena mereka bekerja sama dengan dewan komisaris untuk memberikan pengawasan dan kontrol serta berfungsi sebagai penyeimbang bagi kekuatan manajemen, yang pada gilirannya akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan ESG. Namun, penelitian oleh Rahmadani et al., (2023) menyebutkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak memberikan dampak

pada pengungkapan ESG. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran komisaris independen saja tidak cukup kuat untuk memengaruhi pengungkapan ESG.

Ukuran Komite Audit merupakan jumlah orang yang ditunjuk dalam badan yang bertanggung jawab atas pengawasan laporan keuangan serta proses audit baik internal maupun eksternal perusahaan (Andres & Rodríguez, 2024). Berdasarkan peraturan dari OJK, (2015) Komite Audit harus terdiri dari minimal 3 (tiga) anggota, yang merupakan Komisaris Independen dan pihak di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Jumlah anggota komite audit yang banyak akan menyajikan berbagai perspektif yang berbeda ketika menghadapi suatu masalah (J. C. Pratama & Rohman, 2023). Di samping itu, keberagaman anggota komite audit mampu mempercepat proses penyelesaian masalah yang ada, karena akan ada lebih banyak diskusi serta upaya yang dikerahkan untuk mengatasi masalah tersebut. Komite audit didirikan oleh dewan komisaris dan bertugas untuk mendukung dewan dalam mengawasi mekanisme pengendalian internal perusahaan, mutu laporan keuangan, efek dari audit internal, serta kinerja fungsi audit internal (IKAI Group, 2024). Komite audit memegang peranan penting dalam menjamin kualitas laporan keuangan, menelaah, serta mengevaluasi sistem pengendalian internal dan menjaga hubungan antara manajemen dan auditor eksternal

Kerugian muncul dari investasi PT Telkomsel pada PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, sebuah transaksi yang saat ini sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Tempo, 2025). Terdapat konfirmasi bahwa investasi ini dicurigai tidak mengikuti prinsip-prinsip *Corporate Governance* dan tidak didasarkan pada analisis kelayakan yang cukup. Situasi ini menyoroti kegagalan dalam pengawasan

internal yang seharusnya dilakukan oleh Komite Audit di dalam perusahaan BUMN (Telkomsel). Di samping itu, adanya indikasi konflik kepentingan yang melibatkan pejabat yang juga memegang posisi dalam struktur pengawasan (termasuk Ketua Komite Audit di tingkat perusahaan induk) semakin memperkuat sangkaan bahwa fungsi *check and balance* tidak dijalankan dengan baik.

Penelitian oleh Gempita et al. (2023) menunjukkan bahwa jumlah anggota dalam komite audit mempengaruhi sejauh mana pengungkapan mengenai *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dilakukan. Penemuan ini mengindikasikan bahwa lebih banyak anggota membawa variasi dalam pengalaman, kemampuan, dan pandangan, yang membuat proses pemantauan menjadi lebih efisien. Ukuran komite audit yang besar akan berpengaruh pada penyelesaian isu yang mungkin muncul, terutama dalam hal pengungkapan laporan keuangan dan non-keuangan. Sementara itu, penelitian oleh Kevin Nicholas Sirait, (2024) menegaskan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh pada pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dewan direksi mengenai *Environmental, Social, and Governance* (ESG) menyebabkan mereka tidak mampu memahami praktik yang mendukung ESG, sehingga dapat mengakibatkan pengabaian terhadap kinerja keberlanjutan dan berdampak pada pengungkapan informasi terkait keberlanjutan, termasuk *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

Rapat Dewan Direksi adalah salah satu ukuran penting untuk menilai seberapa aktif dan efektif fungsi pengawasan serta pengambilan keputusan manajerial di dalam sebuah perusahaan (Sari, 2025). Rapat ini diselenggarakan

untuk menjadi tempat bagi para direksi untuk menyampaikan semua tanggung jawab mereka secara efisien dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan, sehingga bisa meningkatkan kinerja perusahaan dan memahami keadaan yang ada di dalamnya (Widijaya & Riskiyanto, 2022). Semakin sering rapat dilakukan, semakin besar indikasi keterlibatan dan aktivitas dewan direksi dalam memantau operasional dan strategi perusahaan, termasuk masalah-masalah keberlanjutan (Rinaldy & Inawati, 2025). Dengan meningkatnya frekuensi rapat dewan direksi, diharapkan dapat memperbaiki kualitas pengungkapan ESG perusahaan, mengingat keputusan untuk mengungkapkan informasi tentang keberlanjutan secara mendalam memerlukan persetujuan dan pengawasan yang rutin dari dewan direksi.

Penutupan sementara aktivitas penambangan batu bara oleh PT RMK Energy Tbk. (RMKE) di tahun 2023 terjadi karena gagal memenuhi tanggung jawab hukum terkait Izin Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Dewan Direksi (Rmol.id, 2023). Pelanggaran ini memiliki potensi untuk mempengaruhi kelangsungan operasi inti perusahaan, yang secara jelas mencerminkan kelemahan dalam pengelolaan risiko operasional dan kepatuhan pada level yang tertinggi. Hal ini berkaitan dengan frekuensi Rapat Dewan Direksi, karena jumlah pertemuan tersebut menjadi indikator penting seberapa aktif Dewan Direksi dalam membahas, mengevaluasi, dan mengambil keputusan cepat mengenai isu-isu krusial seperti perizinan yang esensial. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah IPPKH menunjukkan bahwa pembahasan mengenai risiko kepatuhan dan dampak terhadap operasi mungkin tidak mendapatkan perhatian yang memadai atau tidak ditindaklanjuti dengan serius dalam rapat resmi Dewan Direksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Gempita et al, (2023) menunjukkan bahwa jumlah rapat yang diadakan oleh Dewan Direksi memiliki dampak pada pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Ini berarti bahwa hasil dari studi ini menunjukkan bahwa jumlah rapat yang dilakukan oleh anggota Dewan Direksi, baik sedikit maupun banyak, akan memengaruhi tingkat pengungkapan ESG perusahaan tersebut. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Rinaldy & Inawati, (2025) menyatakan bahwa rapat Dewan Direksi tidak berdampak pada *Environmental, Social, and Governance* (ESG), karena fungsi dari rapat tersebut tidak berjalan dengan baik dan lebih sering dilakukan sebagai bentuk formalitas atau untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh regulator. Oleh karena itu, adanya celah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat saja tidak menjamin efektivitas pengawasan terhadap *Environmental, Social, and Governance* (ESG), sehingga hal ini menjadi variabel penting yang perlu diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini akan menggunakan ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dijaga agar tetap konsisten atau diatur, sehingga tidak akan memengaruhi variabel independen maupun variabel dependen (Wahyuni & Febriansyah, 2023). Ukuran perusahaan adalah seberapa besar atau kecil perusahaan tersebut, yang dapat dinilai berdasarkan jumlah total asetnya (Nuridah et al., 2023). Umumnya, perusahaan besar cenderung memberikan lebih banyak informasi dibandingkan dengan perusahaan kecil (Andriana et al., 2023). Perusahaan besar biasanya menarik perhatian lebih banyak dari publik dan kerap menjadi sorotan, sehingga mereka akan melakukan

pengungkapan informasi yang lebih luas termasuk laporan terkait *Environmental, Social, and Governance* (ESG), sebagai wujud tanggung jawab mereka kepada para pemangku kepentingan (Adhi & Cahyonowati, 2023).

Leverage adalah alat ukur mengenai cara sebuah perusahaan memanfaatkan pinjaman atau utang untuk memperbesar modal yang diperlukan oleh usaha tersebut (S. R. Putri & Mayangsari, 2023). *Leverage* dapat dikatakan sebagai rasio yang menggambarkan sejauh mana sebuah perusahaan mampu melunasi seluruh utang yang dimilikinya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang (Parhusip et al., 2024). *Leverage* adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi penyampaian informasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Ketika tingkat *leverage* sebuah perusahaan lebih tinggi, ada kemungkinan penyedia utang berada dalam posisi yang lebih dominan, sehingga mereka dapat menuntut standar yang lebih baik dari laporan pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (Masyitoh & Indrabudiman, 2024).

Profitabilitas merupakan perbandingan yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu perusahaan (Rivandi & Putra, 2021). Profitabilitas adalah salah satu tanda seberapa baik sebuah perusahaan dalam memperoleh laba, semakin besar angka rasio profitabilitas yang tercipta, maka semakin besar pula keberhasilan perusahaan itu (Lubis & Nugroho, 2023). Profitabilitas mampu memengaruhi pelaporan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), di mana perusahaan cenderung memberikan informasi lebih banyak ketika mereka memiliki kemampuan menghasilkan laba yang besar. Hal ini membuat investor dan kreditor yakin

bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang stabil dan menjalankan operasionalnya dengan baik (Masyitoh & Indrabudiman, 2024).

Penelitian ini mengacu pada Kevin Nicholas Sirait, (2024) dengan judul *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG)*, Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2021. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu: (1) Menambahkan jumlah rapat dewan direksi yang merupakan komponen dari *corporate governance*. (2) Perbedaan model pengukuran pada variabel *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, penelitian sebelumnya menggunakan *Environmental, Social, and Governance (ESG) score* yang dikeluarkan oleh Bloomberg, sedangkan penelitian ini menggunakan indeks GRI 2021.

Penelitian ini dilakukan karena meningkatnya tren global investasi berbasis *Environmental, Social, and Governance (ESG)* menuntut perusahaan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi guna mempertahankan citra, reputasi, dan kinerja jangka panjang. Penelitian ini berfokus pada kerangka *Corporate Governance (CG)*, melalui struktur dan praktik, berfungsi sebagai mekanisme melihat berpengaruh atau tidak terhadap pengungkapan ESG perusahaan. Pemilihan perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX ESG Leaders sebagai objek penelitian didasarkan pada relevansi dan signifikansi strategisnya dalam konteks keberlanjutan dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Indeks ini merupakan representasi dari perusahaan-perusahaan yang dinilai memiliki skor *Environmental, Social, and Governance (ESG)* yang kuat, memiliki risiko kontroversi yang

minimal, serta menunjukkan likuiditas dan kinerja keuangan yang baik (IDX, 2024).

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan serta adanya ketidaksesuaian antara hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), maka penulis mengangkat judul penelitian “**Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Environmental, Social, And Governance (ESG) Pada Perusahaan Indeks IDX ESG Leaders Periode 2021-2024**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, peneliti dapat mengidentifikasi masalah mengenai :

1. Praktik bisnis belum sepenuhnya menerapkan konsep ESG secara menyeluruh. Misalnya, kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Unilever menunjukkan bahwa komitmen perusahaan terhadap aspek keberlanjutan masih belum terintegrasi penuh dalam operasional sehari-hari mereka.
2. Kegagalan tata kelola dalam kasus investasi strategis oleh anak perusahaan BUMN. Dugaan korupsi dan konflik kepentingan dalam investasi Telkomsel di GoTo, secara langsung menyoroti kelemahan kritis dalam peran Kepemilikan Institusional.
3. Terjadinya kasus korupsi proyek EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang merugikan negara sebesar Rp2,1 triliun. Hal ini memiliki keterkaitan erat dengan Ukuran Dewan Direksi, di mana kegagalan pengawasan,

penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik pengadaan yang tidak transparan mengindikasikan bahwa susunan atau jumlah anggota dewan tidak efektif

4. Rendahnya representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan masih pada PT RMK Energy Tbk (RMKE) pada tahun 2020 - 2023, seluruh anggota Dewan Direksi perusahaan ini didominasi oleh pria.
5. Bank Mandiri dituduh melakukan pelanggaran karena memberikan dukungan keuangan kepada entitas yang terlibat sengketa, aktivitas ilegal dan pelanggaran HAM.
6. Kerugian dan dugaan pelanggaran *Corporate Governance* (CG) pada investasi PT Telkomsel di GoTo, yang diselidiki karena kurangnya analisis kelayakan dan konflik kepentingan, menyoroti kegagalan pengawasan internal yang serius dan berhubungan dengan Ukuran Komite Audit.
7. Penutupan sementara kegiatan pertambangan pada PT RMK, karena kegagalan Dewan Direksi dalam memenuhi kewajiban hukum terkait Izin Penggunaan Kawasan Hutan (IPKH). Rapat dewan direksi harusnya dapat mendiskusikan, memantau dan pengambilan keputusan terkait perizinan esensial.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini hanya terbatas pada:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *Environmental, Social, and Governance* (ESG), yang diukur dengan perbandingan nilai total pengungkapan ESG terhadap total pengungkapan maksimal. Variabel ESG dalam penelitian ini diukur menggunakan *ESG Disclosure Index* yang disusun berdasarkan GRI Standards 2021.

2. Variabel independen yang dikaji terdiri dari enam (6) mekanisme *Corporate Governance* (CG) yang diduga mempengaruhi pengungkapan ESG. Variabel-variabel tersebut yaitu kepemilikan institusional diukur dengan perbandingan saham milik institusioanl terhadap total saham beredar, ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah dewan direksi dalam perusahaan, *diversitas gender* diukur dengan perbandingan total direksi perempuan terhadap total dewan direksi, proporsi komisaris independen diukur dengan perbandingan total komisaris independen terhadap total keseluruhan dewan komisaris, ukuran komite audit diukur dengan jumlah komite audit dalam perusahaan dan jumlah rapat dewan direksi diukur dengan jumlah rapat dewan direksi dalam satu tahun.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG)?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG)?
3. Apakah *diversitas gender* berpengaruh terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG)?
4. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG)?

5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG)?
6. Apakah jumlah rapat dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian saat ini merujuk pada :

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh berbagai mekanisme *Corporate Governance* (CG) terhadap tingkat dan kualitas Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Indeks IDX ESG Leaders di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).
3. Untuk mengetahui pengaruh *diversitas gender* terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).
4. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).
6. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat dewan direksi terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini berfungsi sebagai replikasi dan pembaruan data untuk mengisi *research gap* yang timbul dari inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh mekanisme CG tertentu terhadap Pengungkapan ESG, sehingga memperkuat basis literatur akuntansi keberlanjutan. Menyediakan bukti empiris terbaru menggunakan data perusahaan-perusahaan terpilih dalam Indeks IDX ESG *Leaders* selama periode 2020–2024, yang sangat relevan untuk konteks pasar modal Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menyajikan bukti empiris terkait pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai tentang *corporate governance* yang mencakup kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, *diversitas gender*, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit dan jumlah rapat dewan direksi. Selain itu, temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meningkatkan dan memperbaiki penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.